KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DAN PERLINDUNGAN BAGI PENYANDANG CACAT DI WILAYAH PAPUA BARAT

(Studi Formulasi Pada PERDA Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Dan Perlindungan Bagi Penyandang Cacat Di Kota Sorong)

T E S I S

Program Pascasarjana

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Konsentrasi : Kebijakan Publik

Oleh :

ICHSAN MUHAMMAD ABDUH, S.I.KOM

14720017

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

2016

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DAN PERLINDUNGAN BAGI PENYANDANG CACAT DI WILAYAH PAPUA BARAT

(Studi Formulasi Pada PERDA Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Dan Perlindungan Bagi Penyandang Cacat Di Kota Sorong)

T E S I S

Program Pascasarjana

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Konsentrasi : Kebijakan Publik

Oleh :

ICHSAN MUHAMMAD ABDUH, S.I.KOM

14720017

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

2016

Lembar Pengesahan

Tesis ini telah disetujui

Tanggal :

11 FEBRUARI 2016

Oleh ;

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Bonaventura Ngw. MS	**Dr. Sri Hartini J, M.Si**

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DAN PERLINDUNGAN BAGI PENYANDANG CACAT DI WILAYAH PAPUA BARAT

(Studi Formulasi Pada PERDA Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Dan Perlindungan Bagi Penyandang Cacat Di Kota Sorong)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ICHSAN MUHAMMAD ABDUH, S.I.KOM

14720017

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Pada tanggal : 17 Februari 2016

Susunan Dewan Penguji

Ketua,

Prof. Dr. Bonaventura Ngw, MS

Sekertaris,

Dr. Sri Hartini J, M.Si

Anggota Penguji,

1. Dr. Sukardi, M.Si

2. Dr. Rofinus Ngabut, M.Si

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar magister

Tanggal : Maret 2016
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Merdeka Malang

Prof. Dr. Grahita Chandrarin, MSi, Ak.,CA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Mahasiswa peserta Program Magister (S2) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang.

Nama : **Ichsan Muhammad Abduh, S.I.Kom**

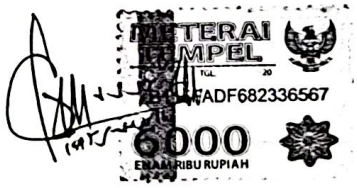
NPK : **14720017**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis saya berjudul :

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DAN PERLINDUNGAN BAGI PENYANDANG CACAT DI WILAYAH PAPUA BARAT (Studi Formulasi Pada PERDA Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Dan Perlindungan Bagi Penyandang Cacat Di Kota Sorong).

Adalah benar – benar hasil karya asli bukan hasil plagiat. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti tidak benar, saya bersedia dituntut dan membatalkan gelar Magister yang telah saya peroleh.

Malang, Maret 2016



Ichsan Muhammad Abduh, S.I.Kom
14720017

Catatan :
Surat pernyataan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai masing – masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

ABSTRACT

Thesis titled "Implementation of Policy and Protection of the Disabled in West Papua region, (Formulation Study On Regional Regulation No. 02 of 2015 on the Implementation and Protection of Persons with Disabilities in Kota Sorong)" is the work Ichsan Muhammad Abduh, who is one of SIKom graduate student at the University Merdeka Malang, to discuss how the process of formulation of local regulation to the things that become supporters and obstacles in setting policy.

In the implementation of national development aimed at realizing a just and prosperous society based on Pancasila and the Constitution of 1945, persons with disabilities are part of Indonesian society that has equality, rights, obligations and role. In national development, persons with disabilities have the status, rights, obligations, and the same role with other Indonesian citizens. Therefore, the role of persons with disabilities in national development needs to be improved and utilized optimally.

Efforts related to the paradigm shift that has been run by the movement of people with disabilities all over the world, in 2006 has resulted in the adoption of a UN Convention on Human Rights for persons with disabilities with all types of disabilities for the first time. The United Nations Convention known as the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD or abbreviated) Convention on Human Rights which is the fastest process of its ratification by a majority of UN member states in the world. This convention became the foundation which are fundamental to the respect, protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities.

Birth of Sorong City Regulation No. 02 of 2015 on the Implementation and Protection of Persons with Disabilities is a measure of the seriousness of the regional government in view the importance of attention to persons with disabilities as a form of struggle for Human Rights (HAM). Through the regulation, policy formulation is an interesting thing to study, given the new law is the first regulation that discusses the protection of persons with disabilities in the city of Sorong.

Keywords: Policy, Disability, Regional Regulation, Formulation

RINGKASAN

Tesis dengan judul "Kebijakan Penyelenggaraan Dan Perlindungan Bagi Penyandang Cacat Di Wilayah Papua Barat, (Studi Formulasi Pada PERDA Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Dan Perlindungan Bagi Penyandang Cacat Di Kota Sorong)" adalah hasil karya Ichsan Muhammad Abduh, S.I.Kom yang merupakan salah satu mahasiswa di pascasarjana Universitas Merdeka Malang, dengan membahas bagaimana proses formulasi peraturan daerah tersebut hingga hal-hal apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam menetapkan kebijakan.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penyandang disabilitas merupakan bagian masyarakat Indonesia yang memiliki kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama. Dalam pembangunan nasional, penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Oleh karena itu, peran penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional perlu ditingkatkan serta didayagunakan seoptimal mungkin.

Usaha-usaha berkaitan dengan perubahan paradigma yang telah dijalankan oleh gerakan penyandang disabilitas seluruh dunia ini, pada tahun 2006 telah menghasilkan diadopsinya suatu Konvensi PBB mengenai Hak Asasi Manusia yang khusus bagi penyandang disabilitas dengan semua jenis disabilitas untuk pertama kalinya. Konvensi PBB tersebut dikenal dengan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (atau disingkat dengan CRPD) yang merupakan Konvensi HAM yang paling cepat proses ratifikasinya oleh mayoritas negara–negara anggota PBB di dunia. Konvensi ini menjadi landasan yang fundamental terhadap upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Lahirnya Perda Kota Sorong Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Bagi Penyandang Cacat merupakan tolak ukur keseriusan Pemerintahan Daerah dalam melihat begitu pentingnya memperhatikan penyandang disabilitas sebagai bentuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM). Melalui Perda tersebut, formulasi kebijakan merupakan hal yang menarik untuk diteliti, mengingat Perda tersebut merupakan perda pertama yang membahas perlindungan bagi penyandang disabilitas di Kota Sorong.

Kata kunci : Kebijakan, Disabilitas, Peraturan Daerah, Formulasi

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang berlimpah saya haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan hikmat, semangat dan petunjuknya sehingga proses pengerjaan tesis dengan judul **"KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DAN PERLINDUNGAN BAGI PENYANDANG CACAT DI WILAYAH PAPUA BARAT"** (Studi Formulasi Pada Perda Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Bagi Penyandang Cacat Di Kota Sorong), dapat berjalan dengan sangat baik hingga terselesaikan tepat pada waktunya.

Penelitian yang berjudul "Kebijakan Penyelenggaraan Dan Perlindungan Bagi Penyandang Cacat Di Wilayah Papua Barat" ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pascasarjana S2 pada Jurusan Magister Administrasi Publik. Didalam penelitian ini dibahas berbagai macam permasalahan, dimulai dari pembahasan deskriptif mengenai formulasi kebijakan Perda Nomor 02 Tahun 2015, faktor faktor yang mempengaruhi pemutusan produk kebijakan, hingga bagaimana penyerapan UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Convention On The Rights For The Persons With Disabilities.

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangsi dalam dunia ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik, juga khususnya kepada Pemerintahan Kota Sorong untuk terus berupaya aktif dalam memenuhi kebutuhan yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), agar mampu menjadi Kota yang maju dan selalu memenuhi kebutuhan masyarakatnya khususnya dalam mendapatkan pelayanan publik yang sesuai.

Atas terselesainya pengerjaan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan seluruh hikmah serta petunjuknya dalam kelancaran proses pengerjaan tesis ini hingga selesai.
2. Kedua Orang Tua yang tak hentinya memberikan semangat juga doanya untuk kelancaran pengerjaan penelitian ini.
3. Prof. Dr. Bonaventura Ngw, MS sebagai Kaprodi Magister Administrasi Publik Universitas Merdeka Malang yang juga bertindak sebagai Dosen Pembimbing I bagi peneliti, sehingga mampu mendorong terselesaikannya penelitian tesis ini.
4. Dr. Sri Hartini J, M.Si selaku Dosen Pembimbing II atas berbagai macam kritikan dan saran sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis dengan cepat.
5. Seluruh Dosen Pendidik di lingkungan Pascasarjana Unmer Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh proses perkuliahan sehingga bisa sampai hingga tahap ini.
6. Seluruh Staff Administrasi di Kampus Pasca Universitas Merdeka Malang yang telah membantu segala pengurusan administrasi penulis sehingga memudahkan penulis untuk menyelesaikan pendidikan penulis selama di Pascasarjana Unmer Malang.

Akhir kata penulis berharap agar karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai bidang Ilmu Administrasi Publik.

Malang, Februari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRACT v

RINGKASAN vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori 13

B. Penelitian Yang Relevan 36

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian 42

B. Lokasi Penelitian 47

C. Jenis Dan Sumber Data 47

D. Instrumen Penelitian 49

E. Populasi Dan Teknik Sampling 50

F. Teknik Pengumpulan Data 53

G. Teknik Keabsahan Data 53

H. Teknik Analisa Data 55

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 57

B. Hasil Wawancara 66

C. Analisis Hasil Penelitian 91

D. Pembahasan Hasil Penelitian 97

BAB V :PENUTUP

A. Kesimpulan 110

B. Saran 112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN